



PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI DI ASIA TIMUR DAN PASIFIK DENGAN KUALITAS PERATURAN SEBAGAI PEMODERASI

Dhinnessa Prabowo¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

1) dhinnessa.prabowo@kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan

2) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Tax is a state financial instrument imposed by the government. Taxes are collected to then finance state programs and activities. The role of taxes is very important for the development of a country. This study aims to analyze the influence exerted by per capita income, share of service in GDP, with Regulatory Quality as a moderator on tax revenues, especially those that occurred in high-income Asia Pacific countries in 2002-2019. The technique that the authors use is the analysis of panel data regression data that has been treated and selected the best model, namely the Feasible Generalized Least Squares (FGLS). The test results show that all variables simultaneously affect tax revenue. Partially, the share of service has a negative and significant effect while per capita income and the quality of regulations have no effect on tax revenues. Regulatory quality weakens the relationship between per capita income and tax revenues while not moderating the relationship between share of service in GDP and tax revenues. Based on the results of this study, the recommendation from the results of this study is that policies are needed that can maximize the service sector for acceptance and improve the quality of regulations on per capita income.

Keywords: *Per Capita Income, Regulatory Quality, Share of Service in GDP, Tax Revenue*

Abstrak

Pajak adalah instrumen keuangan negara yang dikenakan oleh pemerintah. Pajak dihimpun untuk kemudian membiayai program dan kegiatan negara. Peran pajak sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh yang diberikan oleh pendapatan per kapita, kontribusi jasa dalam PDB, dengan Kualitas Peraturan sebagai pemoderasi terhadap penerimaan pajak khususnya yang terjadi pada negara Asia Pasifik berpenghasilan tinggi tahun 2002-2019. Teknik yang penulis gunakan adalah analisis data regresi data panel yang telah diobati dan terpilih model terbaik yaitu *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, kontribusi jasa berpengaruh negatif dan signifikan sementara pendapatan per kapita dan kualitas peraturan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Kualitas peraturan melemahkan hubungan pendapatan per kapita dan penerimaan pajak sementara tidak memoderasi hubungan kontribusi jasa dalam PDB dan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah diperlukan kebijakan yang mampu memaksimalkan sektor jasa untuk penerimaan dan memperbaiki kualitas peraturan pada pendapatan per kapita.

Kata Kunci: Kontribusi Jasa dalam PDB, Kualitas Peraturan, Pendapatan Per Kapita, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi beberapa negara di dunia. Di Indonesia sendiri, dilansir dari laman databoks, penerimaan yang berasal dari pajak menyumbang Rp1.716,8 triliun atau sebesar 65,7% dari total penerimaan negara dan sisanya, sebesar 34,3% berasal dari selain pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan tonggak utama penerimaan di Indonesia (Annur, 2023). Bisa dikatakan juga bahwa pajak tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sendiri dan juga pemerintah (Dewi, 2023). Penerimaan pajak merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai kewajiban mereka untuk membiayai kebutuhan negara.

Dalam beberapa sistem perpajakan, tarif pajak dapat didasarkan pada pendapatan per kapita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk atau dengan kata lain jumlah uang yang diperoleh



setiap orang di suatu negara atau wilayah geografis tertentu. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk menghitung pajak terutang diperlukan penghasilan setiap orang atau badan disertai dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Pendapatan per kapita mencerminkan jumlah pendapatan setiap orang yang nantinya akan menjadi dasar pengenaan pajak yakni pajak penghasilan. Secara sederhana, semakin tingginya pendapatan seseorang, maka kemampuan daya belinya juga meningkat. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga pendapatan yang meningkat tidak berarti diikuti dengan naiknya kemampuan beli masyarakat (Yulianto, 2023). Hal ini berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadikan transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai dasar pengenaannya (Maulida, 2023). Semakin tinggi daya beli maka akan semakin banyak transaksi yang terjadi sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin meningkat.

Negara-negara berpenghasilan tinggi tidak serta merta mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA). Beberapa negara lebih memilih untuk berfokus mengembangkan sektor industri dan jasa. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang besar di sektor agrikultur atau pertambangan, Negara-negara tersebut terus mengembangkan hasil alamnya. Akan tetapi sampai dengan sekarang, baik Indonesia, Thailand, maupun Vietnam belum tergolong sebagai negara dengan berpenghasilan tinggi dan hanya tergolong sebagai *development countries* / negara berkembang saja. Sedangkan negara lain sebagai contoh, Australia dan Singapura. Australia merupakan salah satu penghasil pertambangan dan memiliki cadangan besar dunia untuk brown coal, timbal, rutil, zirkon, nikel, tantalum, bauksit, tembaga, emas dan perak berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2011). Selain itu, Australia juga merupakan salah satu negara penghasil daging sapi berkualitas terbaik di dunia (Chandro, 2019). Negara ini memiliki salah satu ekonomi yang paling terbuka dan inovatif di dunia. Australia tidak hanya mengeksport komoditas, namun juga memiliki industri pabrikan dan jasa yang canggih. Hal itulah yang membuat Australia menjadi negara yang lebih maju dibandingkan Indonesia, Thailand, maupun Malaysia. Negara selanjutnya ialah Singapura. Negara yang tidak lebih besar dari DKI Jakarta ini mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Selain memiliki lokasi yang strategis, Singapura juga memiliki berbagai industri maju seperti di bidang pariwisata, perbankan dan elektronik. Banyak juga dari penduduk Singapura yang bekerja di sektor jasa seperti tempat hiburan, hotel, penginapan, transportasi dan lain sebagainya (Sabiila, 2022). Kedua negara ini menempati posisi 5 (lima) besar sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia berdasarkan Trading Economics (2023).

Pendapatan per kapita dan kebijakan di sektor jasa merupakan wewenang dari masing-masing pemimpin negara. Kebijakan yang diambil pemerintah akan memberikan dampak sejauh mana perekonomian akan berkembang. Sebagai contoh, ketika pemerintah memutuskan kebijakan tertentu yang memengaruhi investasi. Kebijakan yang mendorong investasi berupa penanaman modal di dalam negeri akan berdampak positif dan meningkatkan produksi yang kemudian berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Hal ini sangat berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Begitu pula dengan sektor lain yang akan mendapat pengaruh baik besar maupun kecil ketika “disentil” oleh kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan per kapita, kontribusi jasa dalam PDB, dan kualitas peraturan di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya secara parsial, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan per kapita di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New



Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak, apakah kontribusi jasa dalam PDB di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak, dan apakah kualitas peraturan di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak. Kemudian variabel independen tersebut diberikan pengaruh moderasi untuk melihat apakah interaksi antara pendapatan per kapita dengan kualitas peraturan sebagai variabel moderasi di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak dan apakah interaksi antara pendapatan per kapita dengan kualitas peraturan sebagai variabel moderasi di negara Asia Pasifik yang berpenghasilan tinggi (Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan pajak yang ada dan terus berkembang di beberapa negara merupakan bentuk dari kebijakan dan peraturan pemerintah. Penerimaan pajak yang diperoleh juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas seperti pendapatan per kapita, sektor jasa, maupun kualitas peraturan yang berlaku. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti menjadikan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian kali ini adalah:

No	Judul Jurnal	(Penulis, Tahun)	Variabel Bebas	Hasil Penelitian
1.	Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries	(Arif & Rawat, 2018)	PCI	+
2.	Analisis Pengaruh Sektor Jasa dan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Pajak di Kota Manado	(Tamburian, Kawung, & Sumual, 2017)	SERV	+
3.	Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014	(Purba, 2017)	REG	+
4.	Governance and Tax Revenue	(Syadullah & Wibowo, 2015)	REG	+
5.	Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan	(Chaudhry & Munir, 2010)	PCI	-
			SERV	X
6.	Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries	(Gupta, 2007)	PCI	+
7.	Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries	(Bird, Martinez-Vazques, & Torgler, 2004)	PCI	X
8.	Determinants of Tax Efforts in Arab Countries	(Eltony, 2002)	PCI	+
9.	Measuring the Tax Effort of Developed and Developing Countries: Cross Country Panel Data Analysis	(Piancastelli, 2001)	PCI	X
			SERV	+



10	Tax Revenue in Sub Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption	(Ghura, 1998)	PCI	+
11.	Structural Factors and Tax Revenue in Developing Countries: A Decade of evidence	(Tanzi, 1992)	PCI	X
12.	International Comparisons of Taxation for Selected Developing Countries, 1972–76	(Tait, Grätz, & Eichengreen, 1979)	PCI	X

Keterangan:

PCI : Per Capita Income / Pendapatan Per Kapita

SERV : Share of Service / Kontribusi Jasa dalam PDB

REG : Regulatory Quality / Kualitas Peraturan

+

-

X : Tidak Berpengaruh

Dikarenakan variabel kualitas peraturan selalu bernilai positif dan signifikan penelitian sebelumnya, penulis menjadikan kualitas peraturan sebagai variabel moderasi yang diharapkan mampu memberikan pengaruh variabel pendapatan per kapita dan kontribusi jasa dalam PDB terhadap variabel penerimaan negara. Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis berusaha untuk mengetahui apakah pendapatan per kapita dan kontribusi jasa dalam PDB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Penulis juga berusaha mengetahui apakah pendapatan per kapita dan kontribusi jasa dalam PDB yang telah dimoderasi dengan kualitas peraturan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan kewajiban perpajakan sebagai wujud kewajibannya yang merupakan instrumen keuangan pemerintah bagi pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pemerintah (Agustina, 2020). Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi (Rachdianti, Astuti, & Susilo, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu daerah akan mendorong kemampuan ekonomi masyarakat. Kejadian ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini kemudian memperlihatkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan membayar pembiayaan lainnya termasuk pajak (Putri, 2013). Disamping itu, pendapatan per kapita diutamakan pendapatan per kapita lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok dan sisanya seringkali dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti menabung, berinvestasi, dan mengkonsumsi barang dan jasa lainnya (Hanum & Sarlia, 2019). Peningkatan konsumsi akan meningkatkan penerimaan pajak, dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (Siswanto, 2023). PPN di luar negeri biasa disebut dengan *Value Added Tax* (VAT).

Selain barang, pajak juga dikenakan terhadap jasa. Kontribusi jasa dalam PDB secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan penerimaan pajak. Negara-negara maju biasanya memiliki ekonomi yang sangat didominasi oleh sektor jasa, seperti layanan keuangan, perdagangan, pariwisata, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara itu, negara berkembang atau yang memiliki perekonomian yang lebih bergantung pada sektor primer (pertanian, pertambangan) atau sektor sekunder (industri manufaktur) mungkin memiliki sektor jasa yang relatif lebih kecil (IMF, 2016). Meskipun begitu, sektor jasa tetap menjadi bagian penting dari perekonomian mereka.



Baik penerimaan pajak, pendapatan per kapita, maupun kontribusi jasa dalam PDB, semuanya dipengaruhi oleh kebijakan dan pemerintah di masing-masing negara. Kebijakan dan peraturan pemerintah ini yang kemudian diukur apakah sehat atau tidak melalui instrumen yang dinamakan *Regulatory Quality* atau Kualitas Peraturan. Dilansir dan diterjemahkan langsung dari World Bank (2023):

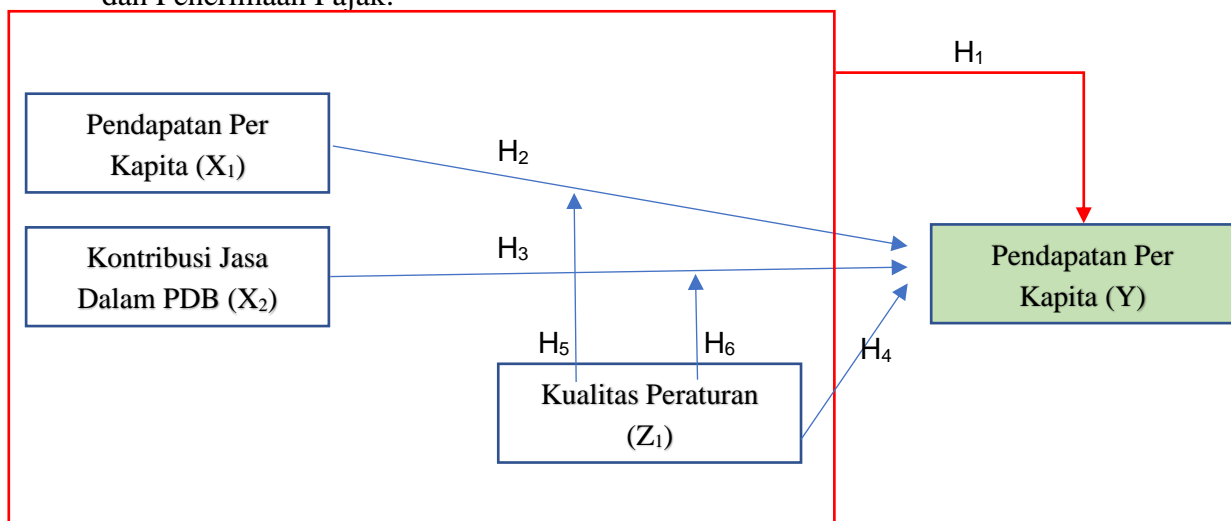
Regulatory Quality captures perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development. Percentile rank indicates the country's rank among all countries covered by the aggregate indicator, with 0 corresponding to lowest rank, and 100 to highest rank. Percentile ranks have been adjusted to correct for changes over time in the composition of the countries covered by the WGI. Percentile Rank Lower refers to lower bound of 90 percent confidence interval for governance, expressed in percentile rank terms.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan dan peraturan yang dibuat, dapat dinilai kualitasnya dari 0 sampai dengan 100. Kualitas peraturan ini akan menilai apakah kebijakan dan peraturan tersebut dapat memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. Kualitas peraturan terhadap sektor-sektor di suatu negara bisa menjadi pembeda ketika kita berbicara mengenai pengaruh suatu sektor terhadap sektor lainnya. Peran kualitas peraturan disini memungkinkan terjadinya kenaikan atau penurunan terhadap perekonomian suatu negara.

Hipotesis dan Kerangka Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Pendapatan Per Kapita dan Kontribusi Jasa dalam PDB, dan Kualitas Peraturan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Negara.
- H₂ : Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.
- H₃ : Kontribusi Jasa dalam PDB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.
- H₄ : Kualitas Peraturan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.
- H₅ : Kualitas Peraturan memperkuat pengaruh hubungan antara Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Penerimaan Pajak.
- H₆ : Kualitas Peraturan memperkuat pengaruh hubungan antara Kontribusi Jasa dalam PDB dan Penerimaan Pajak.



Gambar 1 Kerangka Penelitian



METODE

Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data cross-sectional dan data time series. Dalam data panel, beberapa objek (sebagai unit ekonomi) diamati secara terus menerus selama periode waktu tertentu (bukan untuk periode waktu tertentu). Data panel adalah data dari individu yang sama yang diamati selama periode waktu tertentu. Jika kita memiliki periode waktu T ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, N$), maka dengan data panel kita akan mendapatkan total NT . Jika jumlah satuan waktu untuk setiap individu sama, maka data tersebut dikatakan *balanced panel*. Sebaliknya, jika kita mengatakan bahwa jumlah satuan waktu berbeda untuk setiap individu, maka kita berbicara tentang *unbalanced panel*. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.

Model Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model* (CEM) adalah model regresi data panel yang mempunyai asumsi bahwa nilai intersep dan slop regresi untuk semua unit cross section dan time series adalah sama. Metode *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan untuk mengestimasi model CEM.
2. *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model regresi data panel yang mempunyai asumsi bahwa nilai intersep dari unit cross section atau time series berbeda tetapi mempunyai nilai slope yang tetap. Metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV) digunakan untuk mengestimasi model FEM.
3. *Random Effect Model* (REM) adalah model regresi data panel yang mempunyai asumsi bahwa perbedaan intersep pada unit *cross section* merupakan variabel acak.

Pemilihan Model Terbaik

Lagrange Multiplier

Uji ini untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (PLS) digunakan:

H_0 : Pilih PLS jika $\text{Prob} > \chi^2_{\text{bar}} > 5\%$

H_1 : Pilih RE jika $\text{Prob} > \chi^2_{\text{bar}} < 5\%$

Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah *Common Effect* (PLS/CE) ataukah *Fixed Effect* (FE) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, dengan:

H_0 : Pilih PLS jika $\text{Prob} > F > 5\%$

H_1 : Pilih FE jika $\text{Prob} > F < 5\%$

Uji Hausman

Pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE) yang paling tepat digunakan:

H_0 : Pilih RE jika $\text{Prob} > \chi^2 > 5\%$

H_1 : Pilih FE jika $\text{Prob} > \chi^2 < 5\%$

Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari World Bank periode 2002 s.d. 2019. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Variabel dependen atau respon yang digunakan adalah penerimaan pajak dalam satuan persen yang merupakan perbandingan pajak dengan PDB. Variabel independen atau prediktor yang digunakan adalah pendapatan per kapita dalam satuan USD yang telah di *log-natural*-kan, kontribusi jasa dalam PDB dalam satuan persen, dan kualitas peraturan dalam indeks dengan satuan poin. Variabel-variabel tersebut kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi Stata/MP 17.0.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dilihat melalui pengujian yang telah dilakukan. Pengujian diawali dengan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel yang digunakan selama periode penelitian. Tabel 1 menunjukkan, rata-rata penerimaan pajak negara di wilayah Asia Pasifik Timur yang tergolong ke dalam *High Income Economics* adalah sebesar 17,94%. Nilai penerimaan pajak terendah adalah 8,95% di Hong Kong SAR, China pada tahun 2002 dan tertinggi adalah 31,99% di New Zealand pada tahun 2006. Selanjutnya, rata-rata pendapatan per kapita adalah 10.48228. pendapatan per kapita terendah sebesar 9.485322 di Republik Korea pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 11.12947 di Australia pada tahun 2013. Rata-rata Kontribusi Sektor Jasa dalam PDB adalah sebesar 68.67147. Kontribusi Sektor Jasa dalam terendah di Republik Korea pada tahun 2004 sebesar 53.09698 dan tertinggi terjadi di Hong Kong SAR, China pada tahun 2012 dengan 91.92164. Nilai rata-rata kualitas peraturan sebesar 1.601528 dengan terendah terjadi di Jepang pada tahun 2002 sebesar 0.530458 dan tertinggi di Singapura tahun 2019 dengan 2.260543.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Deskriptif	Mean	Std. dev.	Min	Max
<i>Tax</i>	17.93834	5.935258	8.954245	31.98588
<i>LnPCI</i>	10.48228	.3517472	9.485322	11.12947
<i>Serv</i>	68.67147	10.53746	53.09698	91.92164
<i>Reg</i>	1.601528	.4327595	.530458	2.260543
<i>LnPcireg</i>	16.86818	4.814931	5.507476	24.70045
<i>Servreg</i>	112.4892	41.12786	36.10516	197.5471
<i>Exch</i>	205.759	412.6218	.965801	1277.246

Sesuai dengan langkah yang telah disebutkan sebelumnya, pertama-tama peneliti memasukkan setiap variabel yakni penerimaan pajak, pendapatan per kapita, Kontribusi Sektor Jasa dalam PDB, dan kualitas peraturan yang semuanya memiliki satuan yang sama yakni persen.

Tabel 2. Hasil Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier, dan Uji Hausman

Pengujian	Probabilitas	Perbandingan Model	Hasil Perbandingan	Model yang dipilih
Uji LM	1,0000	PLS vs RE	Terima H0	GLS
Uji Chow	0,0000	PLS vs FE	Tolak H0	FE
Uji Hausman	0,0000	RE vs FE	Tolak H0	FE

Dari semua pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk digunakan adalah FE / Fixed Effect.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Pengujian	Probabilitas	Kesimpulan
Uji Normalitas	Skewness and kurtosis tests (sktest)	0,0029	Tidak Lulus
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factors Test (vif)	765.95	Tidak Lulus
Uji Heterokedastisitas	Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test (hettest)	0,0000	Tidak Lulus
Uji Autokorelasi	Wooldridge test for autocorrelation (xtserial)	0.3070	Lulus

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, diperoleh data sesuai yang tercantum dalam Tabel 3 bahwa hanya pada uji autokorelasi dinyatakan lulus dengan nilai angka di atas alfa 5%. Sementara ketiga uji lainnya, normalitas dan heterokedastisitas menunjukkan angka di bawah alfa 5% serta multikolinearitas dengan angka di atas 10. Ketiga uji ini dinyatakan tidak lulus.

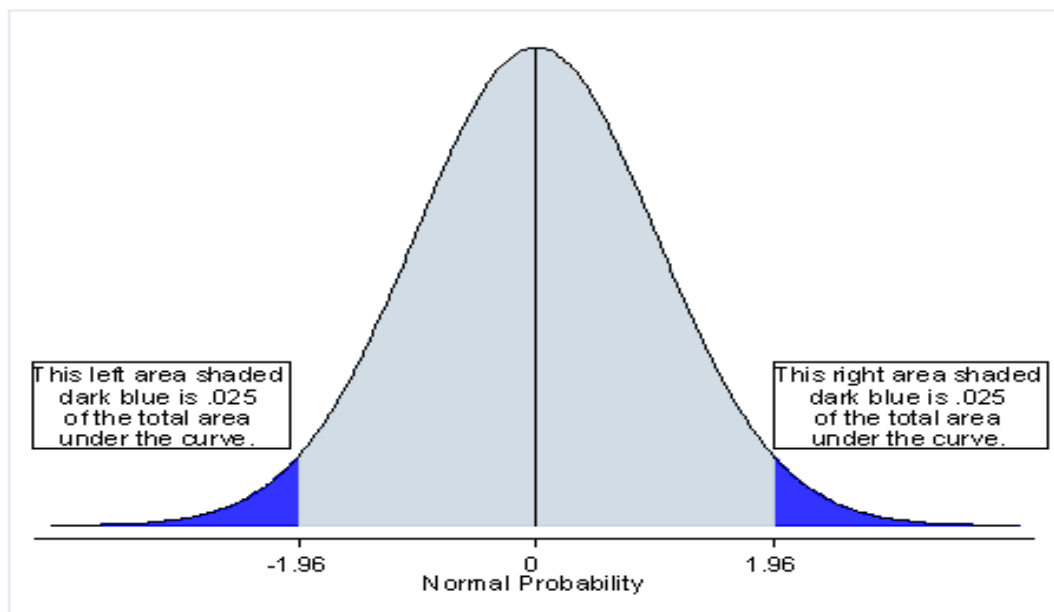


Terkait uji Normalitas yang tidak lulus dapat diabaikan karena data yang digunakan memiliki jumlah besar (lebih dari 30). Maka sesuai dengan teorema limit pusat (Central Limit Theorem/CLT), sampel yang besar akan mengikuti distribusi normal. Masalah kedua yakni Multikolinearitas, dikarenakan penelitian ini menggunakan data panel sehingga masalah multikolinearitas dapat diabaikan mengingat penggabungan data *cross section* dan *time series* merupakan salah satu *rule of thumb* (Gujarati, 2003). Terakhir, cara mengatasi data yang mengalami heteroskedastisitas, salah satunya adalah dengan menggunakan model generalized least squares (GLS) (Sihombing, 2021). Setelah semua uji dapat teratasi maka dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel *Cross-sectional time-series Feasible Generalized Least Squares* (FGLS)

Variabel	Coefficient	Std. err.	z	2-tailed P> z	1-tailed P> z
Pendapatan per Kapita (LnPCI)	10.46797	7.19591	1.45	0.146	0.073
Kontribusi Sektor Jasa (Serv)	-1.280664	.5715431	-2.24	0.025	0.013
Kualitas Peraturan (Reg)	53.84766	35.44393	1.52	0.129	0.065
LnPCI.reg	-7.85438	4.046831	-1.94	0.052	0.026
Serv.reg	.4487524	.2964256	1.51	0.130	0.065
(Nilai Tukar) (Exch)	-.0133335	.0036328	-3.67	0.000	0.000
Cons	-5.330541	60.26962	-0.09	0.930	0.465
Prob > chi2	0.0000				

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditampilkan pada Tabel 4, telah dilakukan dapat diketahui bahwa uji regresi yang dilakukan cukup menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di negara di wilayah Asia Pasifik Timur yang tergolong ke dalam *High Income Economics*. Dari pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa hanya beberapa variabel dan tidak semua variabel yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini, penulis menggunakan hipotesis terarah atau satu arah (*1-tailed*) dalam mengukur sebuah variabel apakah bernilai positif dan negatif. Pada Gambar 2 menunjukkan kurva distribusi normal. Daerah berwarna biru muda merupakan daerah penolakan H_0 (hipotesis nihil). Artinya, jika *z-score* atau nilai signifikansi (*p*) pada titik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa H_0 dapat ditolak pada nilai tersebut untuk menyimpulkan adanya hubungan atau perbedaan. Posisi penolakan berada pada salah satu sisi. Baik itu sisi





kanan (positif) maupun sisi kiri (negatif). Dengan demikian, batas daerah penolakan tetap 5% karena tidak terbagi dalam dua sisi. Hal ini membuat patokan ini menjadi lebih longgar dalam menolak hipotesis nihil (Marvianto, 2018). Oleh karena itu, nilai p -value atau dalam hal ini nilai $P > |z|$ pada hasil perhitungan yang merupakan *two-tailed* (default oleh Stata) dibagi 2 sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan hasil uji parsial yang berbeda-beda pada setiap variabelnya. Pendapatan per kapita secara parsial hanya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.073 yang berarti $P > |z| > \alpha$ (dengan $\alpha = 0,05$). Dengan demikian, pendapatan per kapita secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bird, Martinez-Vazques, & Torgler (2004) dan Piancastelli (2001) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tanzi, 1992) dan (Tait, Grätz, & Eichengreen, 1979) menghasilkan hasil yang sama yakni pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya, Kontribusi Sektor Jasa dalam PDB secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan p -value sebesar 0.013 atau $P > |z| < \alpha$. Setiap kenaikan 1% Kontribusi Sektor Jasa dalam PDB akan memengaruhi penurunan penerimaan pajak sebesar 1.280664. Hal ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Piancastelli (2001) yang menyatakan berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Chaudhry & Munir (2010) juga tidak sejalan dengan menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang membuat kontribusi jasa meningkat tapi penerimaan pajak malah menurun seperti banyaknya jasa yang sulit dipungut pajaknya seperti pelaku bisnis digital dan perusahaan *e-commerce* dengan skala internasional karena terhalang perjanjian pajak dengan negara lain (*tax treaty*) (Widyatama, 2023).

Variabel moderasi sendiri yakni kualitas pemerintah, jika diuji secara parsial maka tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dengan nilai p -value sebesar 0.065 atau $P > |z| > \alpha$. Hasil ini berkebalikan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purba (2017) dan Syadullah & Wibowo (2015). Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kualitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan.

Variabel selanjutnya adalah variabel independen yang telah dimoderasi oleh kualitas peraturan. Berdasarkan data di atas, hasil kualitas peraturan memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak adalah memperlemah hasil penelitian. Koefisien sebelumnya 10.46797 menjadi negatif sebesar -7.85438 setelah dimoderasi oleh kualitas peraturan. Tetapi berkat adanya moderasi dari kualitas peraturan, pendapatan per kapita menjadi berpengaruh signifikan dengan nilai p -value sebesar 0.026. Hal ini dapat dikaitkan bahwa kualitas peraturan yang ada jika dihubungkan dengan pendapatan per kapita, tidak memberi dukungan terhadap penerimaan pajak. Kualitas peraturan yang diberikan tidak menstimulus dan menambah penerimaan pajak.

Pada variabel independen lain, kontribusi jasa dalam PDB yang telah dimoderasi oleh kualitas peraturan menunjukkan adanya penguatan yang sebelumnya bernilai negatif menjadi bernilai positif menjadi sebesar .4487524. Akan tetapi, jika dilihat dari segi signifikansi, kontribusi jasa dalam PDB malah menjadi tidak berpengaruh signifikan setelah dimoderasi oleh kualitas peraturan dengan nilai p -value sebesar 0.065. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas peraturan tidak memoderasi kontribusi jasa dalam PDB sehingga kontribusi jasa dalam PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

**PENUTUP****Simpulan**

Menarik kesimpulan berdasarkan penelitian terhadap variabel dependen, independen, dan moderasi yang telah dilakukan terhadap negara Asia Pasifik berpenghasilan tinggi dengan mengambil data pada tahun 2002 s.d. 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan, pendapatan per kapita, kontribusi jasa dalam pdb, dan kualitas peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Jika melihat hasilnya secara parsial, pendapatan per kapita dan kualitas peraturan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sementara kontribusi jasa dalam PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, kualitas peraturan memperlemah hubungan antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak walaupun membuat hubungan keduanya menjadi signifikan. Sementara itu, kualitas peraturan tidak memoderasi kontribusi jasa dalam PDB karena hasil akhir yang menunjukkan menjadi tidak berpengaruh. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan per kapita di tahun 2002 s.d. 2019 pada negara berpenghasilan tinggi di Asia Pasifik yakni Australia, Hongkong SAR, China, Jepang, Republik Korea, New Zealand, dan Singapura bukan merupakan faktor utama bagi penerimaan pajaknya sementara kontribusi jasa justru berpengaruh negatif bagi penerimaan pajak negara-negara ini. Kualitas peraturan sebagai pemoderasi justru memperlemah hubungan pendapatan per kapita dan penerimaan pajak serta kualitas peraturan tidak memoderasi kontribusi jasa dalam PDB.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan yang mungkin dapat digunakan di masa mendatang adalah pemerintah dapat mengurangi peraturan di bidang pendapatan per kapita karena nilai yang justru negatif ketika pendapatan per kapita dimoderasi oleh kualitas peraturan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang, pemerintah melakukan penggalan lebih komprehensif kembali potensi pajak yang dapat dihasilkan dari kontribusi jasa dalam PDB. Perlu ada penelitian lanjutan dengan menambahkan kepatuhan pajak sebagai variabel independen, moderasi, maupun mediasi. Saran untuk penelitian ini dan penulis pribadi adalah agar menambahkan variabel bebas lain yang lebih berpengaruh dan variabel mediasi untuk menjadikan variabel independen menjadi lebih berpengaruh signifikan. Variabel seperti tingkat kepatuhan pajak atau kontribusi sektor industri bisa ditambahkan untuk memberikan gambaran yang lebih luas. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar dan pedoman bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena variasi yang berbeda akan hasil penelitian satu dengan penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak dan Penerapannya untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi Vol. 18 No. 3*, 407-418.
- Annur, C. M. (2023). *Pendapatan Negara Rp2.626 Triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Mayoritas%20pendapatan%20negara%20pada%202022,%2C3%25%20dibanding%20tahun%20sebelumnya>.
- Arif, I., & Rawat, A. S. (2018). Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries.
- Bird, R., Martinez-Vazques, J., & Torgler, B. (2004). Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries. *International Studies Program Working Paper*.



- Chandro, B. (2019, Juli 9). *Lebih dari Indonesia, Ini Lho Negara-Negara dengan Produksi Daging Sapi Terbesar*. Diambil kembali dari lifepal-user-logo: <https://lifepal.co.id/media/penghasil-daging-sapi-terbesar-berasal-dari-10-negara-ini/>
- Chaudhry, I., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*.
- Dewi, I. D. (2023, Maret). *Pajak, Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat*. Diambil kembali dari pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>
- Eltony. (2002). Determinants of Tax Efforts in Arab Countries. *Arab Planning Institute Working Paper 207*.
- Ghura, D. (1998). Tax Revenue in Sub Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gupta, A. S. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. *IMF Working Paper*.
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 3 No.1*, 84-92.
- IMF. (2016). *Report for Selected Country Groups and Subjects*. Washington DC: IMF.
- Marvianto, R. D. (2018, Juli 10). *Semesta Psikometrika*. Diambil kembali dari Memahami Penggunaan Signifikansi 1-tailed dan 2-tailed: <https://www.semestapsikometrika.com/2018/07/memahami-penggunaan-signifikansi-1-tailed-dan-2-tailed.html?m=1>
- Maulida, R. (2023). *Contoh Soal PPN dan Cara Menghitung Sesuai Peraturan Terbarunya*. Diambil kembali dari online-pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/contoh-ppn>
- Piancastelli, M. (2001). Measuring the Tax Effort of Developed and Developing Countries: Cross Country Panel Data Analysis. *IPEA Working Paper No. 818*.
- Purba, E. (2017). Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014.
- Putri, P. I. (2013). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *JEJAK (Journal of Economics and Policy) Vol. 6 No. 2*, 194-201.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11 No. 1*, 1-7.
- Sabiila, S. I. (2022, November 10). *Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri? Ini Alasannya*. Diambil kembali dari sonora.id: <https://www.sonora.id/read/423565949/mengapa-negara-singapura-lebih-berfokus-pada-perdagangan-dan-industri-ini-alasannya?page=all>
- Sihombing, P. R. (2021). *Corat Coret Catatan Statistisi Pemula*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Siswanto, D. (2023, Maret 15). *Belanja Masyarakat Ngegas, Penerimaan Pajak Konsumsi Diproyeksi Makin Gendut*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-masyarakat-ngegas-penerimaan-pajak-konsumsi-diproyeksi-makin-gendut>
- Syadullah, M., & Wibowo, T. (2015). Governance and Tax Revenue. *Journal of Social and Development Sciences*.
- Tait, A. A., Grätz, W. L., & Eichengreen, B. J. (1979). International Comparisons of Taxation for Selected Developing Countries, 1972–76. *Staff Papers, International Monetary Fund, Vol. 26*.



- Tamburian, L., Kawung, G. M., & Sumual, J. I. (2017). Analisis Pengaruh Sektor Jasa dan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Pajak di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 17 No. 03*, 155-164.
- Tanzi, V. (1992). Structural Factors and Tax Revenue in Developing Countries: A Decade of evidence. *Open Economies: Structural Adjustment and Agriculture*, ed. by Ian Goldin.
- Widyatama, A. (2023). *Faculty of Economics and Business*. Diambil kembali dari Dilema Pajak Ekonomi Digital: <https://feb.ub.ac.id/dilema-pajak-ekonomi-digital/>
- Yulianto, H. (2023). *Faktor dan Indikator Daya Beli Masyarakat*. Diambil kembali dari pajak.com: <https://www.pajak.com/keuangan/faktor-dan-indikator-daya-beli-masyarakat/>